

“Kekerasan itu Katarsis dari Patriarki!”: Resistensi pada Kekerasan terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-laki Baru

Febi Rizki Ramadhan
Peneliti Independen

Abstract

This research examines a movement of men's participation towards the elimination of violence against women in Indonesia known as, Aliansi Laki-laki Baru (later refer as ALB). Using an ethnographic method, this research shows that ALB –as a social movement– could not be understood as a homogeneous and monolithic entity because of its diverse meanings of violence against women that are perceived by the participants. Furthermore, this research addresses the discourse productions as an act of resistance towards patriarchy and hegemonic masculinity. In this paper, I argue, patriarchy and hegemonic masculinity as the ideology of violence against women that are embodied in cultural violence. In doing so, this article shows the interwoven relationship between social movement's meaning-making towards the focus of the movement and the resistance and its main cause: patriarchy and hegemonic masculinity in the context of ALB's social movement practices.

Key words: Aliansi Laki-laki Baru, cultural violence, hegemonic masculinity, patriarchy, resistance, social movement, violence against women

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Aliansi Laki-laki Baru (ALB), gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menunjukkan bahwa ALB sebagai gerakan sosial tidak dapat dipahami sebagai entitas yang homogen dan monolitik. Hal ini dapat dilihat melalui keterlibatan partisipan dalam gerakan ALB yang menginternalisasi keberagaman makna atas kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa produksi wacana yang dilakukan oleh ALB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai resistensi terhadap patriarki dan maskulinitas hegemonik sebagai kekerasan kultural yang menjadi basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan.

Kata kunci: Aliansi Laki-laki Baru, gerakan sosial, kekerasan kultural, kekerasan terhadap perempuan, maskulinitas hegemonik, patriarki, resistensi

Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena sosial yang senantiasa terjadi dalam prevalensi yang fluktuatif. Hal ini dibuktikan dengan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya dirujuk sebagai Komnas Perempuan) yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015, terdapat 305.535 kasus

kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama, 16.217 kasus ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, serta 1.099 kasus yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (lihat Komnas Perempuan, 2016). Angka kekerasan

terhadap perempuan ini menurun pada tahun 2016, menjadi 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berasal dari kompilasi Komnas Perempuan, sebanyak 245.548 kasus ditangani oleh Pengadilan Agama dan 13.602 kasus berasal dari data 233 lembaga mitra penyedia layanan Komnas Perempuan (lihat Komnas Perempuan, 2017:10).¹ Meski menunjukkan penurunan jumlah kasus sepanjang tahun 2015-2016, kekerasan terhadap perempuan cenderung bertahan.

Dalam ruang lingkup akademik, pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Pembahasan-pembahasan ini bervariasi, mulai dari menjelaskan mengenai keterkaitan antara maskulinitas, kebudayaan, dan kekerasan seksual (lihat Kersten, 1996), pertanggungjawaban kolektif atas perkosaan, sebagai bentuk dari kekerasan seksual, pada kelompok laki-laki (lihat May dan Strikwerda, 1994), hingga mengenai kekerasan berbasis gender yang dikondisikan oleh subjektivitas pelaku (lihat Das, 2008). Secara umum, terdapat keserupaan pada kajian-kajian yang berbeda ini, yakni memosisikan laki-laki sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan korban/penyintas. Oleh sebab itu, penting untuk memahami peran laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena laki-laki kerap kali dipandang sebagai aktor kekerasan seksual terhadap perempuan.

Lebih lanjut, dalam konteks akademik, telah terdapat sejumlah kajian yang telah memfokuskan diri pada keterlibatan laki-laki dalam agenda gerakan perempuan, khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan (lihat Kimmel, 1995; Morrell, 1998; Hasyim, 2009; Macomber, 2012). Meski demikian, kajian-kajian ini umumnya lebih fokus pada gerakan sosial di tataran praktik dan melihat bagaimana gerakan

pelibatan laki-laki menegosiasikan identitas kolektif organisasi dalam gerakan perempuan yang lebih luas. Dengan demikian, kajian-kajian sebelumnya, saya pikir, lebih membahas mengenai praktik gerakan sosial, namun cenderung abai pada tujuan gerakan sosial itu sendiri.

Pada konteks Indonesia, mengacu pada Hasyim (2008), gerakan pelibatan laki-laki dalam gerakan perempuan, termasuk di dalamnya gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, telah bermunculan sejak akhir tahun 2000-an dan dimotori oleh laki-laki yang memiliki kedekatan dengan gerakan perempuan. Wacana mengenai keterlibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan makin dikukuhkan ketika sebuah semiloka bertajuk “Merumuskan Strategi Pelibatan Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia” dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2007 (dalam Febrianto, 2014). Lebih lanjut, aktivisme laki-laki di Indonesia dalam agenda keadilan gender ditandai dengan munculnya Aliansi Laki-laki Baru (selanjutnya dirujuk sebagai ALB), gerakan sosial yang berdiri pada tahun 2009 untuk membangun citra laki-laki baru anti-kekerasan terhadap perempuan dan melakukan upaya-upaya yang berorientasi pada perubahan perilaku laki-laki (dalam Febrianto, 2014). Keberadaan ALB ini, saya pikir, menjadi penting untuk dikaji secara antropologis untuk menunjukkan bahwa pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat memiliki repertoar gerakannya tersendiri.

Masalah Penelitian

Sebagai sebuah konsep, kekerasan terhadap perempuan bukanlah konsep yang kehadirannya dapat diterima secara universal pada seluruh masyarakat/komuniti. Apa yang dimaknai oleh satu komuniti sebagai kekerasan seksual (yang dengan demikian merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan) dapat dimaknai sebagai bukan kekerasan seksual oleh komuniti lainnya. Hal ini, misalnya, tampak pada per-

¹ Meski terdapat fluktuasi angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016, saya pikir kita harus memahami bahwa besaran angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan merupakan jumlah kasus yang dilaporkan dan merupakan fenomena gunung es (lihat Komnas Perempuan, 2017:10). Komnas Perempuan (2017:10) menyatakan bahwa masih sangat banyak perempuan korban yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya, apalagi mendatangi lembaga penyedia layanan untuk meminta pertolongan.

bedaan pemaknaan mengenai perkosaan dari sudut pandang feminis dan kelompok etnik di Gerai (lihat Helliwell, 2000). Dengan demikian, pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan haruslah dikontekstualisasi agar kita tidak melakukan distorsi makna atas kekerasan terhadap perempuan itu sendiri dan melakukan generalisasi mengenai konsep 'kekerasan terhadap perempuan'.

Pada paradigma teoritik yang lebih spesifik, yakni feminisme, kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki beragam penjelasan terkait definisi dan etiologinya. Mengacu pada analisis feminisme radikal, misalnya, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya pengondisian dari patriarki sebagai satu kebudayaan yang menyeluruh (lihat Tong, 2014). Di sisi lain, mengacu pada analisis feminisme marxis, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya alienasi yang menyebabkan perempuan terasingkan dari tubuhnya sendiri dan tubuhnya sekadar dijadikan alat bagi reproduksi sosial (lihat Tong, 2014). Dengan demikian, saya pikir, dalam kerangka kritis, pemahaman mengenai adanya perbedaan analisis mengenai definisi dan sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dapat memengaruhi bentuk tindakan yang berbeda untuk mengentaskan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.

ALB, sebagai gerakan pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dapat dikategorisasikan sebagai gerakan sosial (lihat Febrianto, 2014). Mengacu pada Kurzman (2008), pemaknaan merupakan pembahasan yang penting dalam kajian mengenai gerakan sosial untuk menunjukkan hubungan antara makna dan wacana dalam mencapai tujuan pergerakan. Salah satu aspek mendasar dalam pemaknaan dalam konteks gerakan sosial ialah *frame* dan *framing* yang mengacu pada konten dan konteks kultural terkait pesan yang dibawa oleh gerakan sosial tertentu (Benford dan Snow 2000). Pembahasan mengenai *frame* inilah yang menjadi dasar dari kajian yang telah dilakukan oleh Febrianto (2014) sebelumnya mengenai ALB terkait produksi citra alternatif laki-laki baru

yang anti-kekerasan terhadap perempuan.

Persoalan yang harus digarisbawahi, khususnya karena belum dimunculkan dalam kajian yang dilakukan oleh Febrianto (2014), ialah proses pemaknaan bersifat dialogis (lihat Holland, Fox, dan Daro, 2008). Dengan demikian, gerakan sosial tidak membentuk makna dan wacana terkait tujuan gerakannya begitu saja, namun wacana dalam gerakan sosial ini terbentuk melalui proses dialog dengan realita sosial yang ada. Pada konteks ALB, saya berargumen bahwa perlu untuk memahami pemaknaan ALB atas kekerasan terhadap perempuan. Hal ini meliputi definisi dan ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan menurut ALB dan akar masalah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Menurut saya, hal ini harus diperhatikan karena analisis yang berbeda atas kekerasan terhadap perempuan dapat berimplikasi pada strategi, taktik, dan target gerakan yang berbeda pula. Permasalahan ini menjadi penting karena kajian-kajian sebelumnya cenderung abai pada proses dialogis yang terjadi pada gerakan terkait pembentukan strategi gerakan yang, saya pikir, merupakan persoalan yang sentral dalam pembentukan strategi dan wacana yang menjadi lokus utama gerakan sosial.

Lebih lanjut, kritik saya pada kajian yang dilakukan oleh akademisi-akademisi sebelumnya mengenai pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang dilakukan oleh Febrianto (2014) terdapat pada metodologi yang ia gunakan. Febrianto (2014) melihat bahwa ALB dapat mentransformasi perilaku sejumlah individu partisipan gerakan dari perspektif pegiat ALB sendiri yang notabene memang memiliki latarbelakang dari gerakan perempuan. Meski demikian, penelitian Febrianto (2014) sekadar dilakukan pada pendiri dan koordinator ALB sehingga dapat mengabaikan pemaknaan dan/atau persepsi partisipan gerakan yang tidak berada di akar rumput. Berangkat dari kritik saya atas kajian Febrianto (2014) ini, saya menganggap penting untuk memahami bagaimana partisipan gerakan dalam ALB memaknai kekerasan terhadap perempuan. Hal ini

menjadi penting agar kita tidak mengabaikan individualitas dan subjektivitas partisipan ALB. Mengacu pada Salman dan Assies (2009:230), gerakan sosial kerap dipandang sebagai entitas yang homogen 'dari luar', namun sebenarnya memiliki dinamika internal yang kaya di dalamnya, termasuk mengenai persepsi partisipan gerakan terhadap wacana yang menjadi lokus utama gerakan. Dengan demikian, kajian yang saya lakukan mengenai ALB dapat memiliki signifikansi teoritik untuk menunjang pernyataan Salman dan Assies (2009:230) tersebut mengenai dinamika dalam gerakan sosial.

Pada dasarnya, kajian mengenai pelibatan laki-laki dalam gerakan perempuan dan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal baru. Secara umum, kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya cenderung berfokus pada pembahasan mengenai gerakan sosial di tataran praktik, yakni mengenai kebutuhan ruang bagi laki-laki untuk turut bergerak dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Morrell, 1998; Subono, 2009), strategi-strategi terkait pelibatan laki-laki dalam politik emansipasi perempuan (Kaufman, 2001; Gerung, 2009; Subono, 2009; Hasyim, 2009), cara pandang laki-laki pro-feminis pada gerakan perempuan (Bojin, 2013), serta pengalaman dan/atau resistensi aktivis perempuan terkait pelibatan laki-laki dalam gerakan perempuan (Sagala, 2009; Macomber, 2012). Kritik saya pada kajian-kajian tersebut ialah kajian-kajian tersebut terlampaui fokus pada praktik gerakan sosial.² Menurut saya, kajian-kajian tersebut kurang menyentuh pembahasan

² Meski saya menyatakan bahwa sejumlah kajian di atas terlampaui fokus pada praktik gerakan sosial, saya berpikir bahwa kajian-kajian tersebut tetap harus didudukkan secara kontekstual. Pembahasan Kaufman (2001), misalnya, menjadi signifikan karena ia menganalisis signifikansi kampanye *white ribbon* dalam kerangka gerakan perempuan. Pembahasan Macomber (2012) menjadi signifikan karena ia menyoroti bagaimana laki-laki dalam gerakan perempuan tidak dapat diceraikan dari maskulinitas itu sendiri. Pembahasan Subono (2009) menjadi signifikan karena ia menanggapi penjelasan Kaufman mengenai 7P dengan mendorong bahwa terdapat kebutuhan ruang-ruang gerakan bagi laki-laki feminis. Saya tidak menolak pernyataan Casas-cortes (2009) bahwa gerakan sosial dapat menjadi situs produksi pengetahuan dan analisis antropologi. Meski demikian, saya sepakat dengan Diani (dalam Diani dan Della-Porta, 2006:21) bahwa gerakan sosial dibentuk karena memiliki tujuan yang ingin dicapai dan tujuan ini tidak dapat diabaikan begitu saja dalam kajian-kajian akademik.

mengenai tujuan dari gerakan itu sendiri. Kritik ini saya ancam karena, mengacu pada Diani (dalam Diani dan Porta, 2006:21), gerakan sosial dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dengan demikian, bagi saya, pembahasan yang terlampaui fokus pada praktik gerakan dapat cenderung abai pada aspek dialogis yang inheren dalam proses pembentukan wacana gerakan sosial tersebut.

Berdasarkan masalah penelitian yang saya narasikan di atas, terdapat dua pertanyaan penelitian yang saya ajukan, yaitu:

1. Bagaimana ALB, baik sebagai kesatuan gerakan maupun para partisipan gerakan, memaknai kekerasan terhadap perempuan?; dan
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh ALB, baik sebagai kesatuan gerakan maupun para partisipan gerakan, untuk mendekonstruksi basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan?

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah teori yang saya gunakan sebagai kerangka analisis, yakni: (1) Patriarki; (2) Gerakan sosial; (3) Kekerasan kultural; dan (4) Resistensi. Mengacu pada Walby (1990:28), patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Walby mengkonseptualisasi patriarki pada sejumlah tataran. Pada tataran yang abstrak, patriarki berwujud sebagai sebuah sistem relasi sosial, sedangkan pada tataran yang tidak demikian abstrak, patriarki terdiri dari enam struktur yang meliputi mode produksi patriarki, relasi patriarki pada pekerjaan dengan upah, relasi patriarki dalam negara, kekerasan laki-laki terhadap perempuan, relasi patriarki dalam seksualitas, dan relasi patriarki dalam lembaga budaya (dalam Walby, 1990:29). Pada penelitian ini, saya berargumen bahwa patriarki dapat terejawantah sebagai kekerasan kultural. Kekerasan kultural sendiri merupakan konsep yang awalnya ditelurkan oleh Galtung (1990).

Pada dasarnya, Galtung (1990) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk kekerasan yang

dapat terkait satu sama lain, yang terdiri dari kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Tipologi Galtung ini memperluas makna kekerasan sehingga kekerasan tidak sekadar merujuk pada tindakan agresi atau penyerangan yang dilakukan secara fisik, atau yang ia sebut sebagai kekerasan langsung (dalam Galtung, 1969:170). Kekerasan dapat pula terjadi dalam kerangka struktural, yakni kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh secara langsung, namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial dan politik (Galtung dalam Herlambang, 2013:36). Dengan demikian, berbeda dengan kekerasan langsung, kekerasan struktural bisa jadi tidak memiliki aktor yang individual (dalam Galtung, 1969:170). Terakhir, terdapat kekerasan kultural merujuk pada aspek-aspek kebudayaan, bidang-bidang simbolis dari keberadaan kita –seperti agama dan ideologi, bahasa dan seni, pengetahuan empiris dan pengetahuan formal (logika, matematika)- yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural (Galtung, 1990: 291). Lebih lanjut, Galtung (1990:295) menyatakan pula bahwa ketiga bentuk kekerasan ini dapat terkait satu sama lain, baik pada waktu yang bersamaan maupun waktu yang berbeda. Lebih lanjut, Galtung (1990:294) menyatakan bahwa ketiga bentuk kekerasan ini senantiasa terkait dengan dimensi temporal: kekerasan langsung ialah *event*, kekerasan struktural ialah *process*, dan kekerasan kultural ialah *invariation*. Pada dasarnya, Galtung (1990) memang menyatakan bahwa ketiga bentuk kekerasan ini dapat terkait satu sama lain dan dimulai dari salah satu bentuk manapun, sebagaimana ia nyatakan:

“Violence can start at any corder in the direct-structural-cultural violence triangle and is easily transmitted to the other corners. With the violent structure institutionalized and the violent culture internalized, direct violence also tends to become institutionalized, repetitive, ritualistic, like a vendetta.” (Galtung, 1990:302).

Teorisasi Galtung atas kekerasan kultural ini tentu tidak lepas dari sejumlah permasalahan, salah satu yang saya soroti ialah bagaimana ia mendefinisikan kebudayaan atau ‘yang kultural’. Sebagai sebuah konsep, kebudayaan memiliki ancangan definitif yang beragam. Pun ketika Galtung (1990) berbicara mengenai kebudayaan mengenai lapisan simbolis dari keberadaan kita, Galtung masih berada dalam kontinum teoritik yang demikian luas.³ Pada pembahasan ini, saya tidak berupaya mendefinisikan kebudayaan, mengingat kompleksitas teoritik tersebut memang telah terjadi (dan saya setuju dengan sejumlah rancangan definitif mengenai kebudayaan) dan penelitian yang saya lakukan sejatinya tidak sepenuhnya dilakukan untuk mengeksplorasi apa itu kebudayaan. Akan tetapi, saya memandang teorisasi Galtung (1990) atas kekerasan kultural dapat membuka ruang-ruang interpretasi yang lebih luas. Dengan demikian, saya menggunakan teorisasi Galtung atas kekerasan kultural dengan berangkat dari premisnya bahwa penggunaan kebudayaan sebagai medium legitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural itu sendiri dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan.

Lebih lanjut, saya menggunakan konsep gerakan sosial baru dari Pichardo (1997) untuk mengkaji repertoar yang dilakukan oleh ALB dalam praktiknya. Pichardo (1997) menyatakan bahwa gerakan sosial baru merupakan teori yang memperhatikan gerakan sosial di tataran makro-historis dan mikro-historis pada saat

³ Mengacu pada Tumenggung (2005:258), Kroeber dan Kluckhohn mengumpulkan lebih dari 160 definisi kebudayaan pada tahun 1952 dan memaparkan 6 kategori atas definisi kebudayaan yang meliputi: (1)Definisi deskriptif, yakni budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus menunjukkan sejumlah ranah yang membentuk budaya; (2)Definisi historis, yakni budaya sebagai warisan yang dialihkan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya; (3)Definisi normatif, yakni budaya sebagai aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkret serta menekankan gugus nilai tanpa mengacu pada perilaku; (4)Definisi psikologis, yakni budaya sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat manusia dapat berkomunikasi, belajar, atau memenuhi kebutuhan material maupun emosionalnya; (5)Definisi struktural, yakni budaya sebagai abstraksi yang berbeda dari perilaku konkret dan melihat hubungan atau keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah dari budaya; dan (6)Definisi genetis, yakni budaya sebagai aspek yang lahir dari interaksi antar-manusia dan tetap dapat bertahan karena ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

yang bersamaan (lihat Pichardo, 1997:411). Pada tataran makro, teori gerakan sosial baru berfokus pada keterkaitan antara kebangkitan gerakan sosial kontemporer dengan struktur ekonomi yang bersifat makro, serta peran budaya dalam gerakan sosial (lihat Pichardo, 1997:411). Selain itu, gerakan sosial baru kerap dipandang sebagai bentuk gerakan sosial yang diandaikan oleh masyarakat pasca-industrialis (lihat Touraine, 1985). Pembahasan mengenai masyarakat pasca-industrialis ini sendiri pun tidak bebas kritik. Pichardo (1997:419), misalnya, mempertanyakan apakah gerakan sosial kontemporer dan gerakan sosial baru memang merupakan produk dari masyarakat era pascaindustrial. Pertanyaan Pichardo ini berangkat dari gagasan Touraine (1985) bahwa gerakan sosial baru utamanya muncul pada medio tahun 1960-an dan memiliki Pada tataran mikro, teori gerakan sosial berfokus pada isu-isu identitas dan perilaku personal yang mengejawantah pada gerakan sosial (lihat Pichardo, 1997:411).

Kekhususan gerakan sosial baru pada tataran mikro tampak pada fokusnya atas ideologi dan tujuan gerakan, taktik gerakan, struktur gerakan, dan partisipan gerakan sosial (dalam Pichardo, 1997:414). Alih-alih berfokus pada persoalan distribusi dan redistribusi ekonomi layaknya gerakan sosial lama, gerakan sosial baru lebih berfokus pada nilai-nilai dan tujuan gerakan yang bersifat pasca-materialis (lihat Pichardo, 1997:414). Hal ini menyebabkan gerakan sosial baru berfokus pada persoalan otonomi dan identitas (Offe dalam Pichardo, 1997:414). Terkait taktik gerakan, Pichardo (1997:414) memandang bahwa paradigma gerakan sosial baru melihat taktik sebagai cermin dari orientasi ideologis gerakan. Pichardo (1997:415) menyatakan pula bahwa taktik gerakan sosial baru menekankan pembentukan opini publik dan politik anti-institusional melalui repertoar gerakan sosial yang dilakukan. Lebih lanjut, struktur gerakan sosial baru pada umumnya cenderung cair untuk menghindari oligarki dalam gerakan sosial (lihat Pichardo, 1997:416). Terakhir, fokus pada partisipan gerakan menunjukkan bahwa partisipan

dalam gerakan sosial baru umumnya berasal dari kelas menengah 'baru' yang diandaikan oleh masyarakat pasca-industrialis. Lebih lanjut, partisipan gerakan tidak didefinisikan oleh batasan kelas secara ekonomi, melainkan memiliki identitas kolektif yang berangkat dari kesamaan fokus pada isu-isu sosial tertentu (lihat Pichardo, 1997:417-418).

Konsep terakhir yang saya gunakan pada penelitian ini dan terkait erat dengan gerakan sosial ialah resistensi (Hollander dan Eihwoner, 2004). Pada dasarnya, Hollander dan Eihwoner mengumpulkan sejumlah kajian yang membahas mengenai resistensi dan menunjukkan bahwa terdapat dua aspek yang menjadi benang merah dalam kajian-kajian yang membahas mengenai resistensi, yakni tindakan dan oposisi. Hollander dan Eihwoner (2004:538) menyatakan bahwa seluruh kajian yang mereka analisis melihat resistensi meliputi tindakan, entah dilakukan di tataran verbal, kognitif, maupun fisik. Selain itu, hampir seluruh kajian yang mereka analisis melihat resistensi meliputi oposisi (dalam Hollander dan Eihwoner, 2004:438).

Metodologi Penelitian

Mengacu pada Thomas (1993:4), etnografi merujuk pada deskripsi dan analisis kultural yang menyajikan data mengenai kebudayaan melalui proses interpretasi makna oleh subjek yang diteliti dalam penelitian lapangan. Lebih lanjut, antropolog yang menjadi peneliti lapangan dapat mengombinasikan data pengamatan, deskripsi yang digali dari penuturan informan, impresi, serta dokumen untuk memahami fenomena yang dikaji secara kritis (dalam Thomas, 1993:43).

Pada penelitian ini, observasi partisipatoris saya lakukan ketika saya terlibat sebagai *volunteer* ALB *batch* ketiga. Dengan demikian, saya pun terlibat dalam *capacity building* yang dilakukan oleh ALB pada para *volunteer*. Lebih lanjut, observasi partisipatoris saya lakukan pula dengan melihat bagaimana keterlibatan ALB dalam konteks gerakan perempuan yang lebih luas. Hal ini menjadi penting karena ALB menegaskan bahwa

posisinya berada dalam gerakan perempuan dan tidak dapat dipisahkan dari gerakan perempuan itu sendiri. Selama saya melakukan penelitian ini, terdapat sejumlah aksi protes yang dilakukan oleh gerakan perempuan, khususnya di Jakarta, yang memfokuskan diri pada sejumlah agenda protes, termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat sejumlah informan yang perlu saya wawancarai dengan sejumlah karakteristik berikut agar dapat memperoleh data yang komprehensif: (1) Pendiri ALB. Pemilihan informan dengan karakteristik ini saya lakukan karena dengan melakukan wawancara pada pendiri ALB, saya dapat memperoleh pemahaman mengenai profil historis ALB dan bagaimana pemaknaan ALB atas kekerasan terhadap perempuan sejatinya dibangun secara historis; (2) Koordinator nasional/wilayah ALB. Dengan melakukan wawancara pada koordinator nasional/wilayah ALB, saya dapat memahami bagaimana pemaknaan ALB terkait dekonstruksi akar kekerasan terhadap perempuan dapat diproduksi dan direproduksi. Lebih lanjut, keberadaan koordinator nasional/wilayah ALB dapat menjadi signifikan dalam penelitian ini karena koordinator ALB berfungsi sebagai *focal point* ALB (lihat Hasyim, 2014); dan (3) *Volunteer* ALB yang mengikuti kegiatan *capacity building* ALB. Dengan melakukan wawancara pada *volunteer* ALB, saya dapat melihat bagaimana keterlibatan dan pengalaman *volunteer* terkait nilai-nilai yang ia acui mengenai kekerasan terhadap perempuan dapat dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh upaya pemaknaan yang dilakukan oleh ALB. Lebih lanjut, saya dapat menggali pengalaman-pengalaman personal *volunteer* terkait *capacity building* yang dilakukan oleh ALB pada para *volunteer* dan mengeksplorasi kerja-kerja produksi wacana yang mereka lakukan dalam ALB.

Selain melakukan observasi partisipatoris dan wawancara mendalam yang umumnya menjadi kekuatan penelitian antropologi, penelitian ini diperkaya pula dengan studi literatur, khususnya pada sejumlah dokumen (baik yang

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan) terkait ALB, seperti Platform Gerakan ALB (2009), *Draft Code of Conduct* ALB (2011a), serta Dokumentasi ALB yang dilakukan oleh Oxfam dan Australian Aid (2016). Dokumen-dokumen ini menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam karena menunjukkan bagaimana ALB melakukan pemaknaan atas kekerasan terhadap perempuan dan dapat digunakan untuk memaparkan pembahasan yang spesifik mengenai konteks historis ALB. Kajian mengenai dokumen ALB mengacu pada Thomas (1993:38-39), penelitian etnografi dapat dilakukan pula dengan merujuk pada dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Meski demikian, dokumen-dokumen ini pun harus didudukkan secara kritis sebagai data sekunder dan tetap harus dikonfirmasi dengan data primer (lihat Thomas, 1993:39). Dengan demikian, penggunaan dokumen dalam penelitian ini tidak saya jadikan sebagai data yang paling utama, namun tetap dikontekstualisasikan dengan data dari wawancara mendalam dan observasi partisipatoris yang saya lakukan.

Terakhir, saya melakukan analisis pula pada produksi wacana yang dilakukan oleh ALB melalui kanal-kanal media sosialnya, khususnya situs web. Hal tersebut berguna untuk melihat bagaimana ALB melakukan diseminasi wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Mengacu pada Pink dan lainnya (2016), kajian mengenai media yang terlampau menempatkan media sebagai pusat analisis dapat menjadi problematik karena cenderung mengabaikan realita bahwa media terhubung pada lingkungan dan relasi yang lebih luas dan kompleks. Dengan demikian, analisis saya atas penggunaan media daring yang dilakukan oleh ALB dilakukan dengan mendudukkan penggunaan media daring tersebut pada konteks sosialnya. Saya melihat keterkaitan antara media dengan wacana yang diproduksi dan direproduksi oleh ALB untuk turut serta menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Pada penelitian ini, saya tidak membatasi ruang lingkup penelitian dalam lokasi yang terpatenkan batas-batasnya dalam suatu wilayah administratif karena ALB merupakan organisasi gerakan sub-nasional (dalam Febrianto, 2014). Selain itu, ALB—setidaknya sepanjang tahun 2016-2017, selama saya melakukan penelitian lapangan—lebih berfokus pada kerja-kerja peningkatan kesadaran gender dengan menggunakan media sosial sebagai perangkat kampanyenya. Dengan demikian, alih-alih mematok wilayah penelitian, wawancara dan observasi yang akan saya lakukan akan mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh ALB dan para informan terkait. Lebih lanjut, penelitian saya lakukan sejak tanggal 4 Agustus 2016 hingga 29 Mei 2017.

Mengontekstualisasi ALB sebagai Gerakan Sosial

Sebagai gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, saya pikir kita harus mengenali terlebih dahulu profil sosial dari ALB. Pembahasan mengenai profil ini akan meliputi empat pemaparan yang saya urutkan sebagai berikut: Pertama, sejarah pembentukan ALB, hal ini menjadi penting untuk diketahui agar kita dapat mengetahui konteks historis dan diakronik terkait ALB sehingga pembahasan ini tidak menjadi anakronistik. Kedua, prinsip yang dianut oleh ALB, hal ini menjadi penting untuk diketahui karena prinsip inilah yang menekankan gagasan mengenai 'kebaruan' laki-laki yang ditawarkan oleh ALB. Ketiga, struktur ALB, hal ini menjadi penting untuk diketahui karena struktur gerakan dapat mempengaruhi sistem pengambilan keputusan dalam gerakan (lihat Hasyim, 2014). Terakhir, posisi ALB dalam gerakan perempuan yang lebih luas. Hal ini menjadi penting untuk diketahui agar pembahasan mengenai ALB tidak terjebak pada pembahasan yang organisatoris dan administratif, namun dapat didudukkan pada konteks sosial gerakan yang lebih luas.

ALB adalah gerakan lahir dari rahim gerakan perempuan dan bertujuan untuk mengajak laki-

laki untuk terlibat dalam upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan dengan cara membongkar relasi kuasa dalam tatanan masyarakat. Kalimat tersebut merupakan kalimat pengantar yang dapat kita temui dalam laman ALB yang menggambarkan apa yang dimaksud dengan 'ALB' dan apa yang menjadi tujuan dari aliansi ini. ALB berdiri pada tahun 2009 (lihat Febrianto, 2014). Mengacu pada sejumlah wawancara yang saya lakukan dengan para pendiri ALB, pendirian ALB pada awalnya tidak dapat dilepaskan dari kebuntuan yang dihadapi oleh para pendiri—sejumlah aktivis yang bergerak pada isu kekerasan terhadap perempuan—ketika mereka berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan.

"Awalnya *gue* dan Botak diskusi soal kekerasan terhadap perempuan. *Gue* pada waktu itu tuh menemukan titik buntu ini kok enggak habis-habis ya kekerasan terhadap perempuan. Terus *gue* mulai melihat, ini perempuannya terus yang ditargetin, waktu itu *gue* masih di Jurnal Perempuan. Tiap kali workshop, seminar, apa gitu, semua targetnya perempuan dan yang *dateng* juga kebanyakan perempuan. Laki-lakinya mana? Sementara *gue* udah sadar banget kalo laki-laki ini yang mayoritas pelaku kan? Tapi kok belum ada yang nyentuh mereka. Ini kalo perempuannya aja terus perempuannya udah punya pengetahuan untuk berdaya tapi pelakunya yang mayoritas laki-laki belum punya perubahan dalam pola pikir apalagi perilaku, ini nggak akan ketemu. Yang ada ini akan membenarkan perempuan against laki-laki. *Gue* beberapa kali diskusi itu sama Syaldi. Padahal di LSM perempuan kan banyak banget ya laki-laki yang bekerja, tapi *kok* tidak ada program yang untuk laki-laki ya? Terus Botak bilang, 'iya ya nih,' harusnya ada kerja-kerja pelibatan laki-laki." (Shera, 17 Oktober 2016)

Dengan mengacu pada pernyataan Shera (yang merupakan salah seorang pendiri ALB) di atas, kita dapat memahami bahwa sejak awal berdirinya, ALB tidak dapat dilepaskan dari refleksi atas permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang tidak kunjung berakhir. Diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Shera dan Syaldi (pendiri lain ALB, kerap dipanggil dengan julukan 'Botak') merupakan pemicu dari diskusi-diskusi informal berikutnya yang melibatkan sejumlah aktivis lain, di antaranya Nur Hasyim dan Aditya Kurniawan dari Rifka Annisa Women Crisis Center (Pusat Pengem-

bangun Sumberdaya Manusia untuk Penghentian Kekerasan terhadap Perempuan yang berbasis di Yogyakarta), Syafirah Hardani dari Yayasan Pulih, Mariana Amiruddin dan Eko Bambang Subiantoro dari Jurnal Perempuan, serta Farid Muttaqin dari Men's Forum Aceh.

“Kemudian kita ketemu sama temen-temen Rifka Annisa; Mas Boim, Adit. Mereka waktu itu ngasih tau lebih dari 80% korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dalam dampingannya Rifka kembali pada suaminya, yang mana pelaku. Ini ada yang salah nih. Udah sampe titik cerai, tau-tau balik lagi ke suami. Jadi rantai kekerasannya nggak putus-putus. Ini yang kemudian kita sadari, ini langkah yang salah. Kita fokus pada perempuan tapi nggak fokus pada laki-laki. Nah, data dari Rifka Annisa yang dampingannya Rifka Annisa, lebih dari 80% korban kembali ke suami setelah suami melakukan kekerasan. Udah sampe titik cerai tau-tau balik lagi, jadi rantai kekerasan ini nggak putus-putus. Karena di situlah ternyata yang kita sadari bareng-bareng itu langkah yang salah dari awal karena kita fokus pada perempuan tapi nggak pada laki-laki. Terus ngobrol sama Mariana. Ketemu juga beberapa temen pekerja LSM. Kayaknya kalo bikin organisasi sendiri jadi menyulitkan, bagaimana jika temen-temen yang udah bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan bergabung bareng-bareng, beraliansi untuk bikin kerja-kerja pelibatan laki-laki ini. ‘Oh, yaudah ayo-ayo.’ Jalan lah dari situ. Pertemuannya sangat informal ya, karena memang dari awal udah pada tau *base-nya volunteer*, mulai ketemuan di Bandung, kapan pun bisa ngumpul bareng kita ngumpul karena kan beda-beda kota sampe akhirnya 2009, bulan apa ya *gue* lupa Bulan Mei kalo enggak salah itu kita sepakat bikin ALB. Siapa aja yang berorganisasi itu ada Fira di Pulih, Mariana, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), gue YJP, Syaldi YJP, Mas Boim, Adit Rifka Annisa, ada juga Farid dari Men's Forum Aceh. Waktu itu didukung juga sama mbak, aduh kok gue jadi lupa, dari WPF, Mbak Ani, tapi WPF nggak bagian dari aliansi.” (Shera, 17 Oktober 2016).

Pemaparan Shera menunjukkan bahwa terdapat sejumlah organisasi yang pada awalnya terlibat dalam pendirian Aliansi Laki-laki Baru, yakni Yayasan Pulih, Jurnal Perempuan, Rifka Annisa, dan Men's Forum Aceh. Selain itu, mereka juga memperoleh dukungan dari WPF meski WPF bukan merupakan bagian dari aliansi. Lebih lanjut, Aliansi Laki-laki Baru menggunakan kata ‘Aliansi’ karena pada awalnya merupakan aliansi dari sejumlah organisasi yang telah Shera sebutkan sebelumnya. Selanjutnya,

terdapat organisasi yang tergabung pula dalam aliansi ini, yakni WCC Cahaya Perempuan Bengkulu dan Rumah Perempuan Kupang.

“Makanya Aliansi ini namanya aliansi karena awalnya aliansi dari organisasi-organisasi ini, dari awalnya itu, terus ada Women Crisis Center (WCC) Bengkulu, itu ada Kak Tety. Terus belakangan masuk Rumah Perempuan Kupang, jadi ini bukan kayak “Oh ini sepenuhnya organisasi terbuka” karena kita mau memastikan juga bahwa ada komitmen yang dilakukan sama organisasi-organisasi tersebut.” (Shera, 17 Oktober 2016).

Penuturan Shera di atas menunjukkan bahwa pendirian ALB tidak dapat diceraikan dari refleksi yang dilakukan oleh para pendirinya bahwa belum banyak upaya intervensi yang dilakukan oleh gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang ditujukan pada laki-laki yang kerap menjadi kekerasan. Lebih lanjut, penting untuk diperhatikan bahwa para pendiri ALB sejatinya tergabung dalam sejumlah organisasi yang memang bergerak dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, seperti Yayasan Jurnal Perempuan, Yayasan Pulih, Rifka Annisa Women Crisis Center, dan Men's Forum Aceh. Keberadaan organisasi-organisasi ini menegaskan pernyataan ALB yang tertuang dalam Platform ALB (2009) bahwa ALB lahir dari rahim gerakan perempuan.

Dalam praktik gerakan yang dilakukan oleh ALB, terdapat sejumlah prinsip yang harus diterapkan oleh orang-orang yang terlibat dalam aliansi, baik di dalam maupun di luar aliansi. Mengacu pada laman ALB, berikut merupakan prinsip-prinsip yang dianut oleh ALB serta penjabarannya:

1. Berkomitmen terhadap kesetaraan dan keadilan: Aliansi meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, Aliansi menolak segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh salah satu jenis kelamin. Aliansi mendukung sepenuhnya segala strategi afirmasi untuk menciptakan kesetaraan untuk mempercepat pencapaian keadilan.
2. Anti-diskriminasi: Aliansi menolak segala bentuk tindakan diskriminasi atas dasar jenis kelamin maupun diskriminasi atas dasar lainnya. Aliansi akan melakukan upaya-upaya untuk penghapusan tindakan diskriminasi

dengan melakukan kampanye dan advokasi.

3. Anti-kekerasan terhadap perempuan: Aliansi meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan melawan hukum. Aliansi menuntut pertanggungjawaban seratus persen terhadap pelaku kekerasan. Aliansi melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mempromosikan perubahan perilaku kepada laki-laki yang berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan melalui pembangunan citra baru laki-laki yang anti-kekerasan.

Lebih lanjut, ketika melakukan praktik-praktik pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ALB sendiri juga sempat menghadapi resistensi dari sejumlah aktivis perempuan dalam gerakan. Pada diskusi-diskusi informal yang saya lakukan dengan Syaldi dan Shera, mereka sempat menyatakan bahwa terdapat kecurigaan dari gerakan perempuan bahwa munculnya ALB merupakan upaya laki-laki untuk merebut ruang gerakan perempuan dari tangan perempuan itu sendiri. Selain resistensi yang muncul dari kalangan aktivis perempuan sendiri, pertanyaan mengenai apa yang membedakan ALB dari gerakan perempuan lainnya juga kerap muncul dari kalangan non-aktivis. Pada dasarnya, ALB menegaskan bahwa ALB tidak berbeda dengan gerakan perempuan di Indonesia. Mengacu pada laman ALB, terdapat pernyataan bahwa “tidak ada perbedaan yang mendasar antara ALB dengan gerakan perempuan di Indonesia. ALB adalah aliansi yang dibidani oleh organisasi dan individu yang berada dan selama ini aktif dalam gerakan perempuan. Aliansi ini akan berjalan bersama dan mendukung setiap upaya dari gerakan perempuan untuk pengentasan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan berbasis gender.”

Pernyataan ALB ini tentu tidak dapat dicerai-kan dari pembahasan saya sebelumnya mengenai sejarah pembentukan aliansi yang lahir dari organisasi-organisasi yang sejatinya memang memiliki fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, tentu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, jika ALB mendukung

setiap upaya dari gerakan perempuan untuk pengentasan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, maka dengan organisasi gerakan apa saja ALB bersepakat? Mengacu pada wawancara yang saya lakukan pada sejumlah pendiri ALB, setidaknya terdapat dua prinsip mendasar yang dianut oleh aliansi dan perlu untuk diperhatikan lebih lanjut pula, yakni kelekatan dengan organisasi pendukung dan prinsip mengenai politik pendanaan ALB.

Pertama, ALB tentu tidak dapat dipisahkan dari sejumlah organisasi pendukungnya. Ketika penelitian ini dilakukan, sejumlah organisasi yang menjadi organisasi pendukung ALB ialah: (1)Men’s Forum Aceh; (2)Rifka Annisa Women Crisis Center; (3)Rumah Perempuan Kupang; (4)Yayasan Jurnal Perempuan; (5)Yayasan Kalyanamitra; (6)Yayasan Pulih; dan (7)Women Crisis Center Cahaya Perempuan Bengkulu. Keberadaan sejumlah organisasi pendukung ini menjadi signifikan bagi keberadaan ALB karena: (1)Sejak awal berdirinya, ALB dimaksudkan sebagai aliansi dari sejumlah organisasi perempuan yang memang telah berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan; dan (2)Kelekatan ALB dengan organisasi-organisasi pendukungnya ini menegaskan pernyataan dari sejumlah informan bahwa ALB berada dalam kerangka gerakan perempuan dan tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri terpisah dari gerakan perempuan itu sendiri.

Kedua, politik pendanaan ALB. Dalam pembahasannya mengenai posisi ALB dalam gerakan perempuan, Febrianto (2014:17) menyatakan bahwa salah satu poin yang menjadi keresahan aktivis gerakan perempuan ialah beralihnya pendanaan donor terkait donor pemberdayaan perempuan menjadi program keterlibatan laki-laki. Dengan melakukan wawancara pada salah satu aktivis ALB, Febrianto (2014:18) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan segregatif antara dana bagi program gerakan ‘laki-laki’ dan program gerakan ‘perempuan’. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kecurigaan ini memberikan kesan bahwa ‘gerakan perempuan’ dan ‘gerakan laki-laki’ bersaing dalam merebut sumber dana,

padahal gerakan-gerakan ini memiliki tujuan yang sama, yakni sebagai upaya perjuangan kesetaraan gender dan anti-kekerasan terhadap perempuan. Hal ini selaras dengan pernyataan Shera ketika saya temui dalam pembahasan mengenai profil ALB:

“Organ pendukung ya *cuma* soal siapa ya bisa meminta pertanggungjawaban ke kami. Kesepakatan bersama nih soal mengambil dana untuk gerakan perempuan. Kan kalau donor-donor sudah ada pembagiannya, isu gender lebih banyak masuk ke organ perempuan. Ada kue *nih*, kan sudah dibagi-bagi *nih* kue ini beberapa organisasi, kalau sampai ALB masuk ke dalam pembagian kue ini akan jadi masalah juga dan akan jadi masalah sendiri. Makanya dari awal kita meyakini bahwa ALB ini bagian dari gerakan perempuan, kalo kata Mas Jundi ada di gerbong gerakan perempuan.” (Catatan Lapangan Shera, 17 Oktober 2016)

Dengan mengacu pada ujaran Shera di atas, dapat kita lihat bahwa saat ini organisasi pendukung ALB –yang berisikan organisasi dalam gerakan perempuan– dapat meminta pertanggungjawaban pada ALB sehingga ALB tidak merebut ruang politik dalam gerakan perempuan.

Pemaknaan ALB atas Kekerasan terhadap Perempuan

Secara umum, terdapat keberagaman pemaknaan partisipan gerakan ALB atas kekerasan terhadap perempuan dan basis ideologis yang melatarbelakanginya. Secara umum, ALB sendiri sebagai kesatuan gerakan sosial memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindakan melawan hukum (dalam Platform Gerakan ALB, 2009). Lebih lanjut, penuturan seorang Koordinator Wilayah ALB menunjukkan bahwa ALB bersepakat dengan kategorisasi kekerasan seksual yang diancang oleh Komnas Perempuan, yaitu perkosaan; intimidasi, ancaman, dan percobaan perkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan sterilisasi atau kontrasepsi; penyiksaan seksual; penghukuman

tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan; dan kontrol seksual (Catatan Lapangan Jundi, 11 April 2017). Lebih lanjut, ALB sebagai kesatuan gerakan memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan berada di atas fondasi budaya patriarki yang bercokol kokoh dalam masyarakat karena ditopang oleh sistem pelestari yang melibatkan multi-agen (media, institusi agama, institusi keluarga, institusi pendidikan, dan Negara) dan maskulinitas yang hegemonik lahir karena adanya budaya patriarki dan memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan (lihat Platform Gerakan ALB, 2009; *Draft Code of Conduct* ALB, 2011a).

Meski demikian, terdapat ragam pemaknaan yang berbeda dari partisipan gerakan ALB, di antaranya:

- Syaldi: Terdapat ragam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meliputi penganiayaan terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi dan subordinasi di ranah privat, siksaan secara fisik, pelecehan seksual, perkosaan, perkosaan dan penyerangan seksual pada perempuan di daerah konflik, pornografi, aborsi tidak aman, perdagangan perempuan, eksploitasi tubuh perempuan, dan penggunaan tubuh perempuan sebagai alat represi politik. Lebih lanjut, Kekerasan terhadap perempuan dilegitimasi oleh patriarki. (Catatan Lapangan Syaldi, 20 September 2016)
- Shera: Kekerasan tidak hanya terwujud dalam tindakan, namun dapat pula terwujud sebagai nilai. Kekerasan terjadi karena katarsis dari kegagalan laki-laki untuk memenuhi citra idealnya. citra ideal laki-laki ini ditanamkan oleh hegemoni maskulinitas yang turut melahirkan budaya patriarki. (Catatan Lapangan Shera, 17 Oktober 2016)
- Ojan: Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan verbal. Kekerasan dapat terjadi karena kekerasan merupakan tindakan yang dipelajari dan bukan hal yang lahiriah. Terdapat ragam tingkatan yang memengaruhi legitimasi kekerasan, di antaranya keluarga dan Negara. (Catatan Lapangan Ojan, 13 April 2017 dan 18 April 2017)
- Begi: Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Tindakan kekerasan ialah *domino effect*, dalam artian tindak kekerasan yang dilakukan di tataran keluarga dapat menimbulkan beragam

dampak, baik trauma pada korban maupun replikasi tindak kekerasan karena pelaku melihat tindak kekerasan tersebut dilakukan di lingkungannya. (Catatan Lapangan Begi, 14 Oktober 2016)

- Samara: Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Terdapat tiga hal yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi, yaitu: (1) Kekerasan telah dilakukan secara historis dan pelaku mereplikasi kekerasan tersebut tanpa mempertanyakan kembali tindak kekerasan tersebut; (2) Kekerasan dibenarkan oleh sebagian besar penganut agama./dilegitimasi oleh kelompok agama; dan (3) Kekerasan terjadi karena kondisi biologis perempuan yang dapat mengandung dan melahirkan dijadikan sebagai basis legitimasi kekerasan terhadap perempuan. (Catatan Lapangan Samara, 14 April 2017 dan 21 April 2017)

Keberagaman pemaknaan partisipan gerakan ALB atas kekerasan terhadap perempuan, saya pikir, selaras dengan pemaparan Salman dan Assies (2009:230) yang menyatakan bahwa gerakan sosial dapat memiliki dinamika internalnya tersendiri yang menyebabkan terdapat keragaman persepsi partisipan gerakan terhadap wacana yang menjadi lokus utama gerakan. Untuk memahami alasan yang mendasari adanya keberagaman persepsi ini, saya pikir kita perlu memperhatikan subjektivitas aktor dalam gerakan sosial. Pembahasan mengenai subjektivitas ini, saya pikir, dapat dilakukan dengan merujuk gagasan Ortner (2005:31) yang menyatakan bahwa subjektivitas merupakan *“the ensemble of modes of perception, affect, thought, desire, fear, and so forth that animate acting subjects. But I always mean as well the cultural and social formation that shape, organize and provoke those modes of affect, thought, and so on.”* Dengan mengacu pada gagasan Ortner (2005) mengenai subjektivitas tersebut, dapat kita lihat bahwa setiap partisipan dalam gerakan sosial memiliki subjektivitasnya sendiri karena setiap partisipan gerakan adalah individu dan setiap individu adalah subjek.

Pada dasarnya, Ortner pun tidak memandang subjektivitas sebagai hal yang benar-benar muncul dari kesadaran otentik/individual subjek, melainkan memiliki keterkaitan dengan formasi

kultural dan relasi kuasa (lihat Ortner, 2005:52). Dalam melakukan pembacaan atas teks Ortner (2005), Salman dan Assies (2009:233) memandang bahwa Ortner menekankan ketidakmungkinan subjek untuk *‘stand outside of culture’*, namun pada saat yang sama menekankan bahwa kesadaran senantiasa *“multi-layered and reflexive, and its complexity and reflexivity constitute the grounds for questioning and criticizing the world in which we find ourselves”*. Pembahasan mengenai subjektivitas dan habitus ini, saya pikir, menjadi relevan dengan analisis dalam bagian ini. Sebagaimana telah saya paparkan sebelumnya, para partisipan dalam ALB memiliki pemaknaan yang berbeda atas kekerasan terhadap perempuan (meski secara umum memiliki benang merah yang sama) yang tampak pada perbedaan kategorisasi kekerasan terhadap perempuan yang muncul pada penuturan mereka ketika saya melakukan wawancara mendalam. Keragaman pemaknaan partisipan ALB atas kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa setiap partisipan gerakan memiliki subjektivitasnya masing-masing. Meski demikian, subjektivitas tersebut tidak dapat dipahami sebagai persoalan yang otentik dan voluntaris dari para partisipan gerakan.

Lebih lanjut, keragaman pemaknaan partisipan atas lokus utama ALB, saya pikir, terkait pula frase *‘personal is political’* yang ditelurkan oleh Hanisch (dalam Tong, 2014). Inkorporasi atas frase *‘personal is political’*, saya pikir, tidak menjadikan kita sekadar melihat bahwa terdapat relasi antara persoalan-persoalan yang personal di ruang privat dengan persoalan-persoalan politis di ruang publik, melainkan menjadikan kita memandang dan memahami bahwa skema sosio-kultural dapat mengondisikan pemaknaan partisipan gerakan yang demikian personal. Pada dasarnya, argumentasi Hanisch ini, saya pikir, selaras dengan pernyataan Ortner mengenai subjektivitas (lihat Ortner, 2005:33). Dengan demikian, kita dapat memandang pemaknaan partisipan gerakan ALB sebagai bentuk subjektivitas yang senantiasa memiliki keterkaitan dengan skema sosio-kultural yang lebih luas. Dengan

mengelindankan argumen Hanisch (dalam Tong, 2014) dan analisis Ortner (2005) pada analisis mengenai pemaknaan partisipan gerakan ALB atas kekerasan terhadap perempuan, kita dapat memahami bahwa pemaknaan partisipan gerakan dalam ALB tidak berada dalam ruang hampa dan sepenuhnya merupakan persoalan yang individualis dan voluntaris, melainkan dikondisikan oleh aspek-aspek sosio-kultural dalam kerangka yang lebih luas.

Mendudukan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Kekerasan Kultural

Jika kita mengacu pada pemaknaan ALB mengenai basis ideologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya kita dapat melihat bahwa ALB—sebagai kesatuan gerakan sosial—memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya keterkelindanan antara patriarki dan maskulinitas hegemonik. Kedua konsep ini, saya pikir, terkait satu sama lain. Di satu sisi, patriarki, secara umum, didefinisikan sebagai dominasi laki-laki atas perempuan (lihat Walby, 1990). Di sisi lain, maskulinitas hegemonik merupakan konsep yang pada awalnya ditelurkan oleh Connell (lihat Connell dan Messerschmidt, 2005). Pada tahun 1977, Connell menginkorporasi konsep ‘hegemoni’ dari Gramsci untuk membangun konsepnya atas maskulinitas hegemonik (lihat Connell dan Messerschmidt, 2005:831). Mengacu pada Kane (2005:54), maskulinitas hegemonik sejatinya digunakan oleh Connell untuk melihat bagaimana dominasi laki-laki memperoleh legitimasinya.⁴

Patriarki dan maskulinitas hegemonik, saya pikir, dapat dipandang sebagai bentuk dari kekerasan kultural yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Menurut

saya, terdapat dua alasan yang menyebabkan konsep Galtung (1990) mengenai kekerasan kultural dapat dioperasionalisasi pada patriarki dan maskulinitas hegemonik, khususnya untuk melihat bagaimana patriarki dan maskulinitas hegemonik itu sendiri bersifat kultural. Pertama, wacana feminisme mengenai patriarki pada umumnya memandang patriarki sebagai sistem struktur sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan (lihat Walby, 1990:28). Dengan mengacu pada ancangan definitif Walby (1990) tersebut, kita dapat melihat bahwa ‘dominasi’, ‘penindasan’, ‘dan ‘eksploitasi’ merupakan tindakan, baik di tataran interpersonal maupun struktural. Meski demikian, keberadaan ‘patriarki’ itu sendiri tentu merupakan sebuah hal yang tidak kasat mata; pengejawantahan patriarki sebagai dominasi, penindasan, dan eksploitasi—yang merupakan prasyarat ideologisnya pula—memang dapat dilihat sebagai bentuk dari kekerasan langsung dan struktural. Akan tetapi, sebagai ‘sistem struktur sosial’, patriarki itu sendiri menubuh dalam kebudayaan. Dengan demikian, saya pikir, terdapat perbedaan ontologis antara patriarki dengan pengejawantahan patriarki.

Perbedaan ontologis antara patriarki dengan pengejawantahan patriarki dapat tampak ketika kita melihat bahwa patriarki itu sendiri merupakan ideologi (lihat Millet dalam Tong, 2014:54; Firestone dalam Tong, 2014:56; French dalam Tong, 2014:58; Mitchell dalam Tong, 2014:109). Dengan mengontekstualisasi patriarki sebagai ideologi, kita dapat melihat bahwa sejatinya patriarki berada di tataran ide dan/atau gagasan, alih-alih tindakan. Cara pandang ini menjadikan patriarki selaras dengan gagasan Galtung mengenai kebudayaan, yakni “*the symbolic sphere of our existence*” (dalam Galtung, 1990:291). Dengan mengacu pada ancangan definitif dari Galtung tersebut, dapat kita lihat bahwa Galtung memandang kebudayaan sebagai aspek yang berada di tataran simbolik, alih-alih di tataran praksis berupa tindakan.

Kedua, maskulinitas hegemonik, sebagaimana sebelumnya telah saya paparkan, dijelaskan

⁴ Pembahasan Kane (2005:54) berangkat dari argumen Connell mengenai maskulinitas hegemonik. Lebih lanjut, penjelasan Kane (2005:54) mengenai maskulinitas hegemonik tampak pada pernyataan “*Connell (1987:187) argues that there is no need for a concept of hegemonic femininity, because the fundamental purpose of hegemonic masculinity is to legitimate male domination. The subordination of nonhegemonic masculinities is crucial as well, as it allows hegemonic masculinity to legitimate not only male privilege but also race, class, and sexual orientation-based privileges as well.*”

Connell (dalam Connell dan Messerschmidt, 2005:831) dengan menginkorporasi gagasan Gramsci atas hegemoni, yakni dinamika perubahan struktural yang melibatkan mobilisasi dan demobilisasi atas kelas-kelas sosial. Lebih lanjut, hegemoni dapat didefinisikan sebagai penguasaan kesadaran melalui pembentukan kepatuhan dan kesadaran yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa pada masyarakat (dalam Saptawasana dan Cahyadi, 2005:30).⁵

Ketika digunakan dalam konsep maskulinitas hegemonik, hegemoni itu sendiri tampak ketika bentuk maskulinitas yang hegemonik dipandang Connell sebagai maskulinitas yang normatif, sebagaimana dinyatakan Connell, "*Hegemonic masculinity was not assumed to be normal in the statistical sense; only a minority of men might enact it. But it was certainly normative. It embodied the currently most honored way of being a man*" (dalam Connell dan Messerschmidt, 2005:832). Pernyataan Connell dan Messerschmidt tersebut menunjukkan bahwa *embodiment* merupakan poin mendasar terkait maskulinitas hegemonik. Meski demikian, Connell dan Messerschmidt (2005:851) sendiri menyatakan bahwa pola *embodiment* yang terkait dengan hegemoni dalam maskulinitas hegemonik itu sendiri masih belum diteorisasi secara komprehensif, khususnya dalam kajian-kajian yang telah dilakukan mengenai maskulinitas hegemonik sebelumnya.

Kajian Connell dan Messerschmidt ini kemudian memaparkan bahwa maskulinitas hegemonik terkait dengan cara-cara tertentu yang digunakan untuk merepresentasikan dan menggunakan tubuh laki-laki (dalam Connell

dan Messerschmidt, 2005:851). Lebih lanjut, Connell dan Messerschmidt (2005:851) menyatakan bahwa maskulinitas hegemonik terkait dengan tubuh laki-laki, meski ia dapat diadopsi bukan hanya oleh laki-laki. Keterkaitan antara tubuh dengan gagasan maskulinitas hegemonik ini tampak ketika tubuh dipahami oleh Connell dan Messerschmidt (2005:851) sebagai objek dan agen dalam praktik sosial pada saat yang bersamaan. Lebih lanjut, Connell dan Messerschmidt (2005:852) memandang bahwa proses *embodiment* maskulinitas hegemonik ini senantiasa dikonstruksi secara historis. Konstruksi maskulinitas hegemonik secara historis ini kemudian menyebabkan maskulinitas hegemonik kerap dipandang sebagai bentuk maskulinitas yang normatif dan ideal (dalam Connell dan Messerschmidt, 2005).

Selaras dengan pembahasan saya sebelumnya mengenai patriarki sebagai ideologi, proses *embodiment* maskulinitas hegemonik yang terjadi secara historis menyebabkan maskulinitas menjadi aspek yang dipandang ideal, khususnya oleh kelompok laki-laki (lihat Connell dan Messerschmidt, 2005). Dengan demikian, maskulinitas hegemonik –sebagai bentuk maskulinitas yang ideal- sejatinya berada di tataran ide dan/atau gagasan. Pada tataran praksis, maskulinitas hegemonik memang dapat menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender yang terbangun secara material, namun ketika kita bicara mengenai maskulinitas hegemonik sebagai suatu bentuk maskulinitas yang ideal, maskulinitas hegemonik itu sendiri menjadi entitas yang tidak berada di tataran tindakan atau praktik, namun mewujudkan sebagai ide, gagasan, atau nilai yang kerap diacu dan diadopsi oleh laki-laki.

Ketika dioperasionalisasi pada tipologi kekerasan Galtung, patriarki dan maskulinitas hegemonik tidak sekadar menjadi kekerasan kultural karena memiliki sifat-sifat yang 'kultural', namun karena patriarki dan maskulinitas hegemonik dipandang ALB dapat melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang, saya pikir, merupakan bentuk dari kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Hal ini dapat kita

⁵ Teorisasi Gramsci atas konsep 'hegemoni' sejatinya berangkat dari pengalaman Gramsci terkait integritas intelektual para filsuf pada rezim fasis Mussolini di Italia (lihat Saptawasana dan Cahyadi, 2005:30). Gramsci menyatakan bahwa dominasi kekuasaan tidak selamanya berakar pada kepentingan ekonomis belaka, namun juga karena adanya akar-akar kebudayaan dan politis (dalam Saptawasana dan Cahyadi, 2005:30). Hal ini tampak ketika keberhasilan rezim fasis Mussolini tidak sekadar menggunakan jalur pemaksaan dan koersi, namun didukung oleh organisasi-organisasi infrastruktur terkait, yang mengandaikan adanya kepatuhan kelompok intelektual karena faktor kultural dan politis (lihat Saptawasana dan Cahyadi, 2005:30-32). Hal ini selaras dengan penjelasan Connell dan Messerschmidt (2005:831) bahwa, "*hegemony did not mean violence, although it could be supported by force; it meant ascendancy achieved through culture, institutions, and persuasion.*"

lihat dengan merujuk pada penjelasan Komnas Perempuan (2017:2-3) bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya budaya patriarki yang diskriminatif dan subordinatif serta adanya relasi kuasa yang timpang dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, orangtua dan anak, Negara dan rakyat, guru dan murid, serta atasan dan bawahan. Selain itu, Komnas Perempuan memandang pula bahwa keengganan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan seksual untuk meminta pertolongan dapat disebabkan karena ketiadaan lembaga layanan di lokasi korban berada atau karena adanya stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru merupakan pihak yang bersalah atas kekerasan yang ia alami (lihat Komnas Perempuan, 2016:25). Komnas Perempuan memandang pula bahwa kekerasan seksual kerap kali disebabkan karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban sebagai ekspresi penaklukan, inferioritas, teror, dan kontrol yang berhubungan dengan dorongan psikis alih-alih desakan genital (lihat Komnas Perempuan, 2016:54).

Pemaknaan Komnas Perempuan ini, saya pikir, dapat dioperasionalisasi dalam pembahasan penelitian ini karena ALB menyatakan bahwa ALB bersepakat dengan ancangan definitif dan konseptual atas kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan (lihat Catatan Lapangan Jundi, 11 April 2017). Dengan mengacu pada ancangan definitif dan konseptual dari Komnas Perempuan yang disepakati oleh ALB tersebut, kita dapat melihat bahwa stigmatisasi atas tubuh perempuan dan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban –sebagai pengejawantahan dari patriarki dan maskulinitas hegemonik– dapat menyebabkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya dapat terjadi dan senantiasa memperoleh legitimasi.

Pada akhirnya, pemaparan yang telah saya lakukan di atas menunjukkan bahwa patriarki dan maskulinitas hegemonik yang dimaknai oleh ALB dan Komnas Perempuan –yang disepakati oleh ALB– tidak dapat diceraikan dari aspek kekuasaan. Ketika kita berbicara mengenai pa-

triarki, maka kita akan merujuk pada dominasi yang dilakukan laki-laki pada perempuan, entah pada tataran sistem struktur sosial (lihat Walby, 1990) maupun pada tataran ideologis (lihat Millet dalam Tong, 2014:54; Firestone dalam Tong, 2014:56; French dalam Tong, 2014:58; Mitchell dalam Tong, 2014:109). Ketika kita berbicara mengenai maskulinitas hegemonik, maka kita akan merujuk pada aspek-aspek maskulinitas yang dihegemoni (dalam pemahaman yang demikian Gramscian) pada dan diinternalisasi oleh laki-laki (lihat Connell dan Messerschmidt, 2005). Aspek kekuasaan ini menjadi penting karena kekerasan terhadap perempuan yang dimaknai oleh ALB, dengan demikian, tidak dapat dilihat sebagai tindakan yang memang dilakukan secara individual dan voluntaris oleh pelaku kekerasan, namun memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek kekuasaan yang menubuh melalui patriarki dan maskulinitas hegemonik serta menjadikan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk lainnya memperoleh legitimasinya.

Resistensi ALB pada Basis Ideologis Kekerasan terhadap Perempuan

Mengacu pada Platform Gerakan ALB (2009), terdapat dua strategi yang dipilih Aliansi untuk mencapai keadilan gender dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, yaitu: (1) Membangun citra baru laki-laki; dan (2) Melakukan upaya-upaya yang berorientasi pada perubahan laki-laki. Kedua strategi ini dapat selaras dengan pernyataan Shera bahwa selama ini belum banyak kegiatan di gerakan perempuan yang menargetkan laki-laki (dalam Catatan Lapangan Shera, 17 Oktober 2016). Selain itu, jika didudukkan secara antropologis dan dialogis, maka strategi yang dipilih dan dilakukan oleh ALB ini dapat dilihat sebagai pengejawantahan pemaknaan ALB atas kekerasan terhadap perempuan yang telah saya paparkan pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, wacana yang dibangun oleh ALB mengenai kekerasan terhadap perempuan dan basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan (baca: konstruksi maskulinitas dan

budaya patriarki) tidak hanya diinternalisasi pada *volunteer* ALB, namun disebarluaskan pula pada target gerakan ALB yang meliputi remaja laki-laki dan perempuan, laki-laki dewasa, laki-laki aktivis, akademisi, pemuka agama, media, tokoh masyarakat, dan laki-laki pelaku kekerasan (dalam Platform ALB, 2009).

Lebih lanjut, kerja-kerja penyebarluasan wacana yang dilakukan oleh ALB mensyaratkan wacana tersebut tidak sekadar disepakati, namun benar-benar diinternalisasi oleh partisipan gerakan. Hal ini selaras dengan pernyataan Hasyim (2014:50) bahwa komitmen ALB pada nilai-nilai feminis tidak berhenti di tataran deklaratif, namun harus diinternalisasi, diimplementasi, dan terus dievaluasi dari waktu ke waktu. Pernyataan yang selaras muncul dari Huda, salah seorang informan Hasyim (2014), yang menyatakan bahwa, “[for new members] it is not enough for agreement [to the New Men’s Alliance’s values], but they must also internalise [the values]” (dalam Hasyim, 2014:68). Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kerja-kerja penyebarluasan wacana ini tidak dimaksudkan sekadar untuk menyampaikan gagasan pada target gerakan, namun diupayakan agar target gerakan dapat benar-benar menginternalisasi gagasan tersebut dan mengejawantahkan gagasan tersebut pada kehidupan keseharian partisipan gerakan.

Secara umum, meski terdapat banyak hal yang dilakukan oleh ALB dalam rangka pelibatan laki-laki seperti mengirim perwakilan untuk menjadi pembicara pada seminar dan diskusi yang diadakan oleh pihak eksternal, membangun diskusi dengan sejumlah organisasi lain yang bergerak di bidang/isu pelibatan laki-laki seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNFPA, serta mengirimkan delegasi untuk mengikuti sejumlah *camp* yang diadakan pihak eksternal, saya akan membatasi pembahasan dalam bagian ini pada dua bentuk utama produksi wacana yang dilakukan oleh ALB, yakni produksi wacana yang ditujukan pada partisipan gerakan itu sendiri (yakni Forum Belajar Bersama atau *Capacity Building*) dan produksi wacana yang ditujukan untuk target

gerakan ALB, baik pada konteks luring maupun konteks daring.

Mengacu pada *Outline* Kurikulum ALB (2011b:3), ALB sebagai gerakan sosial untuk keadilan gender membutuhkan basis argumentasi yang kuat sehingga berbagai upaya yang dilakukannya –baik pada tataran individual maupun institusional- benar-benar dapat memberikan kontribusi pada penguatan nilai-nilai dan ideologi keadilan gender sebagai bagian dari transformasi sosial. Lebih lanjut, ALB (2011b:3) melihat bahwa dalam konteks pengaruh patriarki dan cara pandang maskulinitas hegemonik yang masih kuat, penguatan basis argumentasi harus dilakukan terus menerus agar setiap individu yang terlibat dalam ALB memiliki kontrol yang kuat dari pengaruh patriarki. Dengan demikian, gagasan untuk membuat forum belajar bersama ALB ini dapat menjadi sejalan dengan kebutuhan ALB untuk memperjelas posisi politik dan ideologi ALB dalam konteks gerakan sosial, khususnya gerakan perempuan di Indonesia (dalam ALB, 2011b:3). *Outline* kurikulum ALB (2011b) ini menyatakan pula bahwa:

“Gagasan membuat forum belajar bersama sebenarnya muncul seiring dengan gagasan Aliansi Laki Laki Baru. Dalam berbagai pertemuan, kebutuhan untuk penguatan kapasitas kita yang terlibat dalam Aliansi Laki Laki Baru menjadi salah satu poin yang sering diangkat dalam berbagai pertemuan anggota. Kebutuhan ini tidak terlepas dari hasil refleksi bagaimana upaya perjuangan keadilan gender dan melawan patriarki melalui Aliansi Laki Laki Baru benar-benar berkontribusi pada perubahan individual dan perubahan sosial menuju keadilan gender, dan tidak justru, disadari atau tidak, melastarkan nilai-nilai patriarkhi yang kita tentang.” (ALB, 2011b:4)

Secara historis, proses pengembangan kurikulum untuk forum belajar bersama ini bermula pada pertemuan ALB di Yogyakarta pada 21-23 Februari 2011 yang sejatinya membahas mengenai posisi gerakan ALB dalam konteks gerakan perempuan (dalam ALB, 2011b:4). Lebih lanjut, terdapat sejumlah tujuan dari forum belajar bersama ini (dalam ALB, 2011b:5), yaitu:

1. Menguatkan *awareness* dan membangun kapasitas berpikir kritis para anggota ALB terhadap nilai-nilai patriarki dan ideologi kekerasan.
2. Menguatkan tradisi belajar terus menerus dan membangun kemampuan refleksi kritis terhadap pengalaman personal maupun sosial terkait patriarki.
3. Membangun kapasitas anggota aliansi untuk melakukan transformasi personal dan sosial dalam perjuangan keadilan gender.

Lebih lanjut, Outline Kurikulum ini menjelaskan pula bahwa forum belajar bersama ini disediakan secara terbuka untuk setiap individu yang terlibat dalam upaya-upaya terkait pencapaian keadilan gender dan keadilan seksualitas, meski pada tahap awal, kegiatan ini akan lebih banyak ditujukan bagi anggota ALB (dalam ALB, 2011b:5). ALB menyatakan pula bahwa proses pembangunan argumentasi, pada dasarnya, dapat dilakukan secara individual, yakni ketika individu yang terlibat dalam gerakan dengan aktif melakukan proses refleksi diri, mempertanyakan pengetahuan dan pengalamannya, dan dilanjutkan dengan proses belajar terus menerus untuk memikirkan bagaimana setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam gerakan dapat berkontribusi pada perjuangan penegakan nilai dan ideologi keadilan gender (lihat ALB, 2011b:3). Pernyataan ALB ini, saya pikir, menunjukkan bahwa ‘forum belajar bersama’ yang dilakukan oleh ALB ini sesuai dengan frase *‘personal is political’* yang diancang oleh Hanisch (1970) pada aras feminisme gelombang kedua. Lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa proses refleksi diri merupakan bagian yang khas dalam gerakan, khususnya pada jika dilihat dengan menggunakan paradigma gerakan sosial baru, karena gerakan dapat mendorong partisipasi untuk selalu mempertanyakan makna dan nilai-nilai dari tindakan dan pengetahuannya serta mendorong partisipasi gerakan untuk senantiasa *self-reflexive* (lihat Pichardo, 1997:415).

Pada Kurikulum Forum Belajar Bersama ALB tahun 2011, terdapat sejumlah tema yang dilihat perlu dikaji dalam forum belajar bersama, yaitu: (1) Gender dan feminisme, (2) Patriarki

dan maskulinisme; (3) Seksualitas; (4) Kekuasaan dan privilese; (5) Kekerasan; (6) Gerakan laki-laki dalam konteks gerakan perempuan; (7) Maskulinitas dan agama; (8) Maskulinitas dan budaya; (9) Maskulinitas dan kebijakan; dan (10) Maskulinitas dan globalisasi (dalam ALB, 2011b:4). Lebih lanjut, ALB melihat bahwa terdapat sejumlah konsep dan teori yang harus dipahami dalam upaya perjuangan menuju keadilan gender dan harus senantiasa direfleksikan (dalam ALB, 2011b:13). Konsep dan teori tersebut meliputi konsep dan teori mengenai gender, maskulinitas, femininitas, seksualitas, kekuasaan dan privilese, kekerasan, patriarki/maskulinisme, seksisme, feminisme, aktivisme dan gerakan sosial (dalam ALB, 2011b:13). Selanjutnya, Kurikulum Forum Belajar Bersama ALB yang diperbaharui pada tahun 2015 pada dasarnya tidak melahirkan kebaruan yang benar-benar berbeda dari Kurikulum Forum Belajar Bersama ALB yang dirancang tahun 2011.⁶ Meski demikian, pembaharuan kurikulum tampak pada materi forum belajar yang kian berkembang. Pada Kurikulum Forum Belajar ALB yang diperbaharui tahun 2015, sejumlah materi yang diubah dan/atau ditambahkan meliputi: (1) Maskulinitas dan korupsi; (2) Maskulinitas dan pembangunan; (3) Maskulinitas dan sumber daya alam; (4) Maskulinitas dalam konteks gerakan perempuan; dan (5) Maskulinitas dan hak-hak kesehatan reproduksi (dalam ALB, 2015). Kita dapat melihat bahwa materi-materi Forum Belajar Bersama dan *capacity building* di atas terkait dengan maskulinitas, kekerasan terhadap perempuan, serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan melihat kurikulum Forum Belajar ALB di atas, kita dapat memahami bahwa produksi wacana yang dilakukan untuk membangun kesadaran partisipasi tersebut tentu tidak

⁶ Hal ini, misalnya, dapat dilihat pada Latar Belakang Gagasan, Latar Belakang Historis, Visi Kurikulum, Metode Belajar, dan Sasaran Forum Belajar yang tidak terlampau berbeda. Prinsip-prinsip Forum Belajar Bersama yang dianut juga tidak berubah, yaitu: (1) Prinsip kebebasan berpikir; (2) Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan pandangan; dan (3) *Zero tolerance* terhadap dominasi dan kekerasan (lihat ALB, 2011b; ALB, 2015)

dapat diceraikan dari pemaknaan ALB sendiri mengenai kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi relevan dengan pernyataan Pichardo (1997:415) yang memandang bahwa taktik dalam gerakan sosial, dalam paradigma gerakan sosial baru, merupakan cerminan dari orientasi ideologis mereka. Dengan demikian, produksi wacana yang dilakukan oleh ALB terkait dan dikondisikan oleh pemaknaan ALB sendiri atas kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya, dalam kurun waktu 2014-2015, ALB melakukan program Forum Belajar, sebagai bentuk implementasi program yang dilakukan bersama RutgersWPF, Yayasan Pulih, dan sejumlah organisasi gerakan perempuan lainnya. Mengacu pada laman ALB dan dokumen-dokumen dalam grup internal ALB, terdapat delapan Forum Belajar yang dilaksanakan sebagai berikut: (1) Gender dan maskulinitas; (2) Agama dan maskulinitas; (3) Psikologi laki-laki dan kekerasan; (4) Seksualitas laki-laki; (5) Laki-laki sebagai *Caregiver* untuk Korban Kekerasan Seksual; (6) LGBT dan moralitas; (7) Peran Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender; dan (8) Peran Laki-laki dalam pengasuhan Anak. Pembahasan pada subbab ini akan dilakukan dengan mengeksplorasi forum-forum belajar tersebut sehingga kita dapat melihat bagaimana ALB menyebarluaskan wacana mengenai maskulinitas dan/atau kekerasan melalui diskusi tatap muka.

Lebih lanjut, penting untuk diperhatikan bahwa ALB menekankan pentingnya partisipasi dalam tiap forum belajar. Hal ini, misalnya, dapat dilihat pada Panduan Moderasi Forum Belajar ALB (2014) yang menyatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam ruangan adalah narasumber dan belajar adalah proses bersama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ALB tidak menegaskan premis '*personal is political*' yang, mengacu pada Hasyim (2014:50), disepakati oleh ALB. Premis '*personal is political*' ditelurkan oleh Hanisch (1970) untuk menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman personal perempuan tidak dapat diceraikan dari kerangka sosial dan politik yang lebih luas. Mengacu pada Hasyim

(2014:50), inkorporasi ALB atas frase '*personal is political*' menyebabkan partisipan gerakan mempertanyakan setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari mereka yang selama ini dipandang normal. Hal ini, saya pikir, menjadi penting karena sejumlah penulis menyatakan pula bahwa gerakan sosial baru memiliki fitur ideologis yang *self-reflexive* (lihat Pichardo, 1997:415). Dengan demikian, partisipan gerakan didorong untuk mempertanyakan makna atas tindakan dan pengetahuan mereka secara konstan (dalam Pichardo, 1997:415). Tindakan mempertanyakan makna atas tindakan dan pengetahuan ini, saya pikir, terejawantah pada Forum Belajar yang dilakukan oleh ALB sehingga peserta Forum Belajar didorong untuk mempertanyakan kembali nilai-nilai yang selama ini mereka anut.

Dengan demikian, pengalaman-pengalaman personal dan keseharian yang dipandang normal ini dapat didudukkan dengan kritis untuk mengidentifikasi struktur sosial yang mempengaruhi pengalaman-pengalaman personal ini (dalam Hasyim, 2014:50). Ketika pengalaman-pengalaman personal dan keseharian ini didudukkan dengan kritis, maka peserta Forum Belajar dapat melakukan reinterpretasi atas makna yang mereka terima sebagai hal yang alamiah. Reinterpretasi atas makna ini, lebih lanjut, dapat mendorong subjek yang menjadi peserta Forum Belajar untuk bertindak. Hal ini selaras dengan gagasan Freire (dalam Ollis, 2012:39) yang menyatakan bahwa *critical thinking* dan *action* terkait erat satu sama lain melalui *conscientization*. Freire (dalam Ollis, 2012:39) menyatakan pula bahwa melalui *conscientization*, individu-individu akan terberdayakan dan, dengan menggunakan pengetahuan dan kesadaran yang mereka peroleh, mereka dapat memahami dampak dari sistem opresi yang dominan dan mampu mendekonstruksi atau merekonstruksi wacana-wacana yang telah terbangun dengan ajeg di masyarakat. Meski demikian, Syaldi menyatakan bahwa ALB menghadapi kesulitan ketika mengadakan forum belajar dengan prinsip ini, sebagaimana dinyatakan oleh Syaldi:

“Tapi susah ternyata ngubah cara diskusi yang pembicara-audien jadi semua jadi pemberi informasi. Yang datang biasanya berharap dapat sesuatu, padahal kita harap semua yang datang bisa *sharing* pengalaman masing-masing. Itu bisa memperkaya wacana.” (Catatan Lapangan Syaldi, 17 Oktober 2016)

Lebih lanjut, dengan mengedepankan pengalaman peserta forum belajar, Syaldi memandang bahwa wacana yang dibahas oleh ALB dapat menjadi semakin kaya. Hal ini selaras dengan pernyataan Ollis (2012:177) bahwa pengalaman-pengalaman yang subjektif kerap kali menjadi hal yang sentral dalam aktivisme karena dapat memengaruhi bagaimana partisipan gerakan bertindak dalam gerakan yang ia lakukan.

Dalam rangka melakukan diseminasi wacana, ALB tidak sekadar melakukan kerja-kerja di tataran *offline*, namun turut menggunakan media *online* secara aktif. Hal ini dapat tampak pada penggunaan sejumlah kanal media sosial yang digunakan oleh ALB, yakni situs web, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, dan LinkedIn. Meski terdapat sejumlah kanal yang digunakan oleh ALB, pembahasan pada bagian ini akan berfokus pada penggunaan situs web ALB. Alasan pemilihan situs web sebagai kanal media sosial yang saya analisis pada pembahasan ini ialah saya melihat bahwa wacana yang diproduksi ALB di tataran daring berpusat pada situs web dan kemudian disebarluaskan melalui kanal media sosial lainnya.

Secara umum, tulisan yang dipublikasikan dalam laman ALB mencakup banyak perspektif dan fokus pembahasan. Meski demikian, terdapat lokus utama yang menjadi keserupaan dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam laman ALB, yakni mengenai maskulinitas dan/atau keadilan gender. Hal ini, misalnya, dapat dilihat pada beragam tulisan yang dimuat namun tetap membahas mengenai dua gagasan tersebut, mulai dari pembahasan mengenai keterkaitan antara bunuh diri dan hegemoni maskulinitas, reinterpretasi atas tafsir agama yang dipandang diskriminatif pada perempuan, keterkaitan antara pengelolaan sumber daya alam dengan maskulinitas, hingga mengenai maskulinitas protes.

Keragaman pembahasan dan perspektif ini dapat terjadi karena tulisan yang berada dalam laman ALB tidak selalu ditulis oleh redaksi, namun dapat berasal dari siapapun yang mengirimkan tulisannya pada ALB (meski tetap melalui tahapan kurasi). Hal ini dapat menunjukkan bahwa laman ALB sesuai dengan salah satu karakteristik media sosial, yakni partisipasi (lihat Mayfield dalam Febrian, 2014:2). Dengan demikian, media sosial merangsang hubungan timbal balik dan dapat meniadakan batas (lihat Mayfield dalam Febrian, 2014:2). Pada konteks praktik gerakan ALB, hubungan timbal balik ini tampak ketika siapapun dapat mengirimkan tulisannya dalam rangka turut memproduksi wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Sejumlah tulisan di atas menunjukkan bahwa ALB menggunakan media daring, khususnya situs web, sebagai medium penyebarluasan wacana. Hal ini selaras dengan pernyataan Edwards (2004:164) bahwa internet memiliki sejumlah fungsi dalam gerakan sosial, yang salah satunya ialah diseminasi informasi. Lebih lanjut, Edwards (2004:166) menyatakan bahwa internet memiliki fungsi dalam gerakan sosial untuk manajemen *frames*. Gerakan sosial memiliki perspektif tertentu mengenai masalah-masalah sosial. Gerakan sosial menggunakan internet untuk melakukan diseminasi *frames* ini dan untuk mempengaruhi agenda publik terkait. Internet dapat berfungsi sebagai medium baru untuk memaparkan *frames* mereka pada publik dan penjelasan mengenai masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh gerakan pada publik serta sebagai ruang untuk menciptakan makna bersama dan identitas kolektif di antara anggota dan konstituensi gerakan.

Argumentasi Hollander dan Eihwohner (2004) dan Ortner (2005) mengenai resistensi yang telah saya paparkan sebelumnya, saya pikir, mengantarkan kita pada satu pertanyaan: Apakah ALB melakukan resistensi atas kekerasan terhadap perempuan? Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terejawantah dalam berbagai bentuk, khususnya ketika dikontekstualisasi dalam tipologi

kekerasan Galtung, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan terhadap perempuan dalam ketiga bentuk kekerasan ini mensyaratkan adanya kekuasaan yang menubuh dalam patriarki dan maskulinitas hegemonik yang dimaknai ALB sebagai basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan.

Pada pembahasan dalam bagian ini, saya berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan mengeksplorasi kerja-kerja yang dilakukan oleh ALB, baik dalam hal membangun pemaknaan atas kekerasan terhadap perempuan maupun menginkorporasi nilai-nilai feminisme dalam praktik gerakan sosial yang dilakukan oleh ALB dan partisipan gerakan ALB sebagai bentuk dari resistensi ALB pada kekerasan terhadap perempuan yang terejawantah dalam berbagai bentuk kekerasan.

Mengacu pada Platform Gerakan ALB (2009), ALB merupakan gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, laman FAQ atau *Frequently Asked Questions* ALB (2012) menyatakan bahwa ALB bertujuan mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender dan membangun paradigma baru tentang laki-laki. Penggunaan istilah laki-laki baru ini merujuk pada upaya gerakan untuk meninggalkan paradigma lama mengenai laki-laki yang menginternalisasi nilai-nilai kelelakian yang patriarkal dan bertransformasi menjadi individu yang sadar untuk ikut memperjuangkan kesetaraan gender, baik pada tataran individual maupun kehidupan bermasyarakat (dalam laman ALB, 2012). Pernyataan ALB pada laman FAQ mengenai kebaruan paradigma laki-laki ini selaras dengan pernyataan Shera bahwa,

“Tentu kita menawarkan nilai-nilai baru itu maknanya namanya Aliansi Laki-laki Baru karena kita ada nilai-nilai yang baru. Temen-temen ALB itu menyadari bahwa nggak ada dari kita yang ideal, baik laki-laki maupun perempuan, kita diberikan ilusi bahwa ada nih yang ideal seperti A seperti B dan kita dituntut untuk memenuhi yang ideal seperti itu.” (Catatan Lapangan Shera, 17 Oktober 2016)

Penjelasan ALB dalam Platform Gerakannya dan penuturan Shera di atas menunjukkan bahwa ALB memiliki posisi yang tegas dalam melakukan praktik gerakan sosial. Penegasan posisi dalam melakukan praktik gerakan ini tampak ketika ALB memposisikan dirinya dalam gerakan perempuan dan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Penegasan posisi ini tampak pula pada *Code of Conduct* ALB (2011a) yang memaparkan sejumlah nilai yang harus diinternalisasi dan dipraktikkan oleh partisipan gerakan ALB, seperti anti-poligami, peduli pada masalah perempuan, tidak melanggengkan stereotip berbasis gender, tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan, melakukan pembagian peran yang setara, mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik, tidak melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual, serta bukan pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Ketika ALB melakukan penegasan posisinya dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik secara ideologis maupun praksis, apakah dengan demikian ALB memiliki oposisi dengan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri? Saya pikir, dengan mengacu pada kerangka pikir dari Hollander dan Eihwohner (2004), kita dapat menyatakan bahwa ALB memiliki relasi yang oposisional dengan kekerasan terhadap perempuan. Harus dipahami bahwa oposisi yang dimaksud oleh Hollander dan Eihwohner tidak didefinisikan sebagai oposisi dengan kekuasaan yang selalu terinstitusionalisasi dalam bentuk-bentuk yang material, namun dapat tampak pula pada oposisi pada gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang diskursif. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dari pernyataan Brown (dalam Hollander dan Eihwohner, 2004:538) yang menyatakan resistensi sebagai, “*conscious questioning of the existing structure of domestic roles and a rethinking of how these roles may be structured*” dan pernyataan Faith (dalam Hollander dan Eihwohner, 2004:538) yang menyatakan resistensi sebagai, “*deliberate rejection of values that sustain existing power relations.*” Dengan demikian, oposisi dalam resistensi pun dapat dilakukan pada nilai-nilai yang berada

di tataran ideologis. Pada konteks ALB, hal ini tampak pada patriarki dan maskulinitas hegemonik yang dimaknai ALB sebagai basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan.

Lebih lanjut, upaya ALB untuk melibatkan laki-laki dalam membongkar paradigma kelakian yang patriarkis mensyaratkan adanya oposisi pada paradigma kelakian-lakian yang patriarkis tersebut. Dengan demikian, ALB memiliki oposisi yang jelas, yakni kekerasan terhadap perempuan yang dapat mewujudkan dalam beragam bentuk, termasuk dalam bentuk kekerasan kultural sebagai nilai dan ideologi patriarkal dan maskulinitas hegemonik yang melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Argumen ini tentu dapat menjadi problematis; ketika ALB saya nyatakan memiliki relasi oposisional dengan kekerasan terhadap perempuan, apakah ALB sedang melakukan resistensi pada kekerasan terhadap perempuan?

Pada titik ini, pembahasan mengenai patriarki dan maskulinitas hegemonik sebagai bentuk dari kekerasan kultural saya pikir menjadi relevan. ALB dengan lugas menyatakan bahwa praktik gerakannya terjadi ketika ALB berupaya membangun citra baru laki-laki. Sebagaimana dinyatakan oleh Shera (lihat Catatan Lapangan Shera, 17 Oktober 2016) dan Platform Gerakan ALB (2009), citra baru laki-laki ini dikonstraskan dengan nilai-nilai yang secara tradisional diadopsi dan diinternalisasi oleh laki-laki serta memiliki keterkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan mengenai kekerasan kultural menjadi penting ketika kita mengeksplorasi dari mana nilai-nilai kelaki-lakian yang tradisional ini muncul, yang menurut ALB dikonstruksi oleh patriarki dan maskulinitas hegemonik. Dengan demikian, ketika ALB berupaya membangun kesadaran laki-laki dengan melibatkan laki-laki dalam gerakan perempuan (sebagaimana dinyatakan Febrianto, 2014), kita dapat melihat bahwa kesadaran laki-laki ini tidak berada dalam ruang hampa dan hadir begitu saja secara alamiah, namun memiliki keterkaitan dengan patriarki dan maskulinitas hegemonik yang merupakan bentuk dari kekerasan kultural. Lebih

lanjut, upaya ALB untuk membangun kesadaran laki-laki dapat dipandang sebagai penolakan ALB terhadap nilai-nilai maskulinitas yang patriarkal dan, dengan demikian, menunjukkan bahwa ALB melakukan resistensi pada kekerasan terhadap perempuan, baik tindakan kekerasan itu sendiri di tataran praksis maupun nilai-nilai yang diejawantahkan oleh patriarki dan maskulinitas hegemonik di tataran ideologis.

Kesimpulan

Pada bagian simpulan ini, saya berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian yang saya ajukan pada bagian pendahuluan, yakni: (1) Bagaimana ALB, baik sebagai kesatuan gerakan maupun para partisipan gerakan, memaknai kekerasan terhadap perempuan?; dan (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh ALB, baik sebagai kesatuan gerakan maupun para partisipan gerakan, untuk mendekonstruksi akar dari kekerasan terhadap perempuan? Secara umum, terdapat tiga poin simpulan yang saya ajukan dalam penelitian ini, yakni:

Pertama, ALB—sebagai kesatuan gerakan—memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Lebih lanjut, ALB bersepakat dengan kategorisasi dari Komnas Perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, para partisipan gerakan dalam ALB dapat memiliki pemaknaan yang tidak sepenuhnya sama dengan pemaknaan ALB sebagai kesatuan gerakan mengenai kekerasan terhadap perempuan karena setiap partisipan gerakan memiliki subjektivitas masing-masing yang dikondisikan oleh beragam aspek.

Kedua, pemaknaan ALB—baik sebagai kesatuan gerakan maupun partisipan gerakan—diejawantahkan dalam sejumlah upaya yang dilakukan oleh ALB untuk mendekonstruksi patriarki dan maskulinitas hegemonik yang dimaknai ALB sebagai akar dari kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini, lebih lanjut, menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh

ALB tidak dapat diceraikan dari pemaknaan ALB—baik sebagai kesatuan gerakan maupun para partisipan gerakan—mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi argumentasi Pichardo (1997) bahwa strategi dan taktik gerakan sosial baru merupakan cerminan dari orientasi ideologis gerakan.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh ALB untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diceraikan dengan pemaknaan ALB atas kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, gerakan sosial saya pandang sebagai entitas yang senantiasa dialogis, khususnya ketika praktik gerakan sosial ALB kita pandang sebagai bentuk resistensi pada kelindan bentuk kekerasan

a la Galtung (1990) yang terwujud pada bentuk kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.

Pada akhirnya, dengan mendudukan ALB sebagai gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara dialogis, saya pikir kita dapat memahami bahwa ALB tidak sekadar melakukan pelibatan laki-laki dalam gerakan perempuan, namun kita dapat beranjak pada pembahasan yang lebih komprehensif dan kritis mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh ALB sebagai gerakan, yakni menawarkan identitas laki-laki baru yang anti-kekerasan terhadap perempuan untuk turut terlibat dalam dekonstruksi patriarki dan maskulinitas hegemonik sebagai basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan.

Referensi

Aliansi Laki-laki Baru

2009 *Platform Gerakan Aliansi Laki-laki Baru*. Tidak dipublikasikan.

2011a *Draft Code of Conduct Aliansi Laki-laki Baru*. Tidak dipublikasikan.

2011b *Outline Kurikulum Forum Belajar Bersama Aliansi Laki-laki Baru: Perubahan Individual dan Transformasi Sosial untuk Keadilan Gender*. Tidak dipublikasikan.

2015 *Outline Kurikulum Forum Belajar Bersama Aliansi Laki-laki Baru: Perubahan Individual dan Transformasi Sosial (Diperbaharui)*. Tidak dipublikasikan.

Casas-Cortés, M. I.

2009 *Social Movements as Sites of Knowledge Production: Precarious Work, the Fate of Care and Activist Research in a Globalizing Spain*. Disertasi Doktorat Strata Tiga. Tidak diterbitkan. Chapel Hill: Department of Anthropology, University of North Carolina

Benford, R.D. dan Snow, D.A.

2000 "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment" dalam *Annual Review of Sociology* 26. Hlm. 611-639

Bojin, K. C.

2013 "Feminist Solidarity: No Boys Allowed? Views of Pro-feminist Men on Collaboration and Alliance-building with Women's Movements" dalam *Gender and Development* 21 (2). Hlm. 363-379

Connell, R.W. dan Messerschmidt, J. W.

2005 "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept" dalam *Gender and Society* 19 (6). Hlm. 829-859

Das, V.

2008 "Violence, Gender, and Subjectivity" dalam *Annual Review of Anthropology* 37. Hlm. 283-299

Diani, M. dan Della-Porta, D.

2006 *Social Movements: An Introduction*. New York: Wiley

Edwards, A.

2004 "The Dutch women's movement online: Internet and the organizational infrastructure of a social movement" dalam W. V. D. Donk (Peny.) *Cyberprotest: New Media, Citizens, and Social Movements*. London: Routledge. Hlm. 161-180

Febrian

2014 Fleksibilitas Interpretasi Penggunaan *Meme* para *Mememaker* 1CAK.COM. Tesis. Tidak diterbitkan. Depok: Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia

Febrianto, R. F.

2014 Feminisme dan Aktivisme Laki-Laki: Analisis *Frame Alignment* dalam Gerakan Laki-Laki Pro-Feminis (Studi Sosiologi Gerakan Sosial mengenai Upaya Pengorganisasian Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru). Skripsi Sarjana Strata Satu. Tidak diterbitkan. Depok: Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia

Galtung, J.

1969 "Violence, Peace and Peace Research" dalam *Journal of Peace Research* 6 (3). Hlm. 167-191

1990 "Cultural Violence" dalam *Journal of Peace Research* 27 (3). Hlm. 291-305

Gerung, R.

2009 "Feminisme dan Partisipasi Laki-laki" dalam *Jurnal Perempuan* 64. Hlm. 17-23

Hanisch, C.

1970 "The Personal is Political" dalam Shulamith Firestone dan Anne Koedt (peny.) *Notes from the Second Year: Women's Liberation; Major Writings of the Radical Feminists*. New York: Radical Feminism

Hasyim, N.

2008 "Berbagi Kehidupan dengan Perempuan: Membaca Gerakan Laki-laki Pro-perempuan di Indonesia" dalam *Jurnal Analisis Sosial* 13 (1): 78-89

2009 "Gerakan Laki-laki Pro-Perempuan: Transformasi Dua Sisi" dalam *Jurnal Perempuan* 64. Hlm. 53-76

2014 How far can men go? A Study of the men's movement to end violence against women in Indonesia. Tesis Master Strata Dua. Tidak diterbitkan. Wollongong: Department of Law, Humanities, and the Arts, University of Wollongong

Helliwell, C.

2000 "It's Only a Penis: Rape, Feminism, and Difference" dalam *Signs* 25 (3). Hlm. 789-817

- Holland, D., Fox, G., dan Daro, V.
 2008 "Social Movements and Collective Identity" dalam *Anthropological Quarterly* 81 (1). Hlm. 95-126
- Hollander, J. A. dan Eihwoner, R. L.
 2004 "Conceptualizing Resistance" dalam *Sociological Forum* 19 (4). Hlm. 533-554
- Kane, E. W.
 2005 "No Way My Boys Are Going to Be Like That!: Parents' Responses to Children's Gender Nonconformity" dalam Michael S. Kimmel dan Michael A. Messner (peny.) *Men's Lives*. Boston: Allyn & Bacon. Hlm. 52-69
- Kaufman, M.
 2001 "Building a Movement of Men Working to End Violence Against Women" dalam *Development* 44 (3). Hlm. 9-14
- Kersten, J.
 1996 "Culture, Masculinities and Violence Against Women" dalam *The British Journal of Criminology* 36 (3). Hlm. 381-395
- Kimmel, M.
 1995 *The Politics of Manhood*. Philadelphia: Temple University Press
- Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
 2016 *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara (Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan)*. Jakarta: Komnas Perempuan
 2017 *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat (Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan)*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Kurzman, C.
 2008 "Meaning-Making in Social Movements" dalam *Anthropological Quarterly* 81 (1). Hlm. 5-15
- Macomber, K. C.
 2012 *Men as Allies: Mobilizing Men to End Violence Against Women*. Disertasi Doktoral Strata Tiga. Tidak diterbitkan. Chapel Hill: Department of Philosophy, North Carolina State University.
- May, L. dan Strikwerda, R.
 1994 "Men in Groups: Collective Responsibility for Rape" dalam *Hypatia* 9 (2). Hlm. 134-151
- Morrell, R.
 1998 "The new man?" dalam *Agenda* 14 (37). Hlm. 7-12
- Murdijana, D. dan Hasyim, N.
 2016 *Laki-laki dalam Asuhan Feminisme: Gerakan Laki-laki Baru untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pencapaian Keadilan Gender di Indonesia*. Jakarta: Oxfam dan Australian Aid

- Ortner, S. B.
2005 "Subjectivity and Cultural Critique" dalam *Anthropological Theory* 5 (1). Hlm. 31-52
- Ollis, T.
2012 *A Critical Pedagogy of Embodied Education: Learning to Become an Activist*. New York: Palgrave Macmillan
- Pichardo, N. A.
1997 "New Social Movements: A Critical Review," dalam *Annual Review of Sociology* 23. Hlm. 411-430
- Sagala, R. V.
2009 "Pengalaman-pengalaman Aku yang Perempuan: Laki-laki Feminis?" dalam *Jurnal Perempuan* 64. Hlm. 25-36
- Saptawasana, B. dan Cahyadi, H.
2005 "Kebudayaan sebagai Kritik Ideologi: Diteropong dari Perspektif Para Eksponen Neo-Marxisme," dalam Mudji Sutrisno dan Henda Putranto (peny.) *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm. 19-49
- Salman, T. dan Assies W.
2009 "Anthropology and the Study of Social Movements" dalam Bert Klandermans dan Conny Roggeband (peny.) *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. New York: Springer Publishing. Hlm. 205-265
- Subono, N. I.
2009 "Lelaki sebagai Mitra dalam Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan" dalam *Jurnal Perempuan* 64. Hlm. 113-123
- Thomas, J.
1993 *Doing Critical Ethnography*. Newbury Park: SAGE Publications Inc
- Tong, R.
2014 *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press
- Tumenggung, A. M.
2005 "Kebudayaan (Para) Konsumen," dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (peny.) *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm. 257-270
- Walby, S.
1990 *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Wiley Blackwell

Internet

<http://lakilakibaru.or.id/> terakhir diakses pada 30 Mei 2017 pukul 14.40 WIB